



# RENCANA KERJA 2023



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR**

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	1
1.3    Maksud dan Tujuan .....	2
1.4    Sistematika Penulisan Renja .....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD ...	4
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	11
2.3    Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat .....	12
2.4    Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT</b>	
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat .....	22
3.3    Program dan Kegiatan .....	23
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT</b>	
4.1    Rencana kerja dan pendanaan inspektorat .....	31
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1    Penutup .....	36

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan ridhonya kepada kami sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Rencana Kerja juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026. Selain itu Rencana Kerja ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan.

Agar penyusunan Renja Tahun 2023 ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan perlu melibatkan pihak – pihak yang terkait, sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi dapat dengan mudah teratasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan guna penyempurnaan di tahun – tahun mendatang.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Akhirnya kami berharap, seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Inspektorat Tahun 2023 ini, dapat dilaksanakan sesuai rencana dan akhirnya bermanfaat untuk aparaturnya pemerintah pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



**AGUS CUNANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650420 199008 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 74 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa, dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD terlebih dahulu dawali dengan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk maksud tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar menyusun Rencana Kerja untuk tahun 2023.

Penyusunan rencana kerja pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah ini akan memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 ini merupakan rangkaian penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya, yang dimulai dari proses kegiatan identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, yang dalam proses penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja akan disinkronisasikan dengan Renstra dan dokumen lainnya.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2023 akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penentuan KUA-PPAS yang pada akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Tahun 2023.

### **1.2 Landasan Hukum.**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan target prioritas yang akan dicapai pada tahun mendatang. Tujuan yang dicapai dari penyusunan Renja ini adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2021 - 2026
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam OPD maupun RPJMD.

#### **1.4 . Sistematika Penulisan Renja**

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III    TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT**

##### **BAB V     PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.**

Pada tahun anggaran 2021, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan melalui 3 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.817.352.455 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.399.075.720 (83,7%).

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2021 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Pada tahun 2021 Inspektorat memperoleh anggaran sebesar Rp. 14.817.352.455,- penggunaan terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi sebesar Rp. 11.605.992.180,- realisasi sebesar Rp. 10.955.663.731,- belanja modal sebesar Rp. 1.102.695.675 realisasi Rp. 1.003.293.356,-.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Renstra 2016 - 2021 dimana Renstra periode 2021 telah mengalami revisi. Dari seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terpenuhi target antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dari evaluasi terhadap capaian kinerja program yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, dan dapat terealisasi 96% disebabkan adanya P2UPD yang tidak dinilai angka kreditnya karena meninggal dunia.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 6 jenis dan terealisasi 0%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu sub kegiatan tersebut direalisasikan pada sub kegiatan lain.

2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dari evaluasi terhadap capaian kinerja program tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 200.000 eksemplar dan terealisasi 124.568 eksemplar. Penyebab tidak terpenuhinya target, karena disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari evaluasi terhadap capaian kinerja program tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 1.400 kali yang direncanakan dan terealisasi sebanyak 411 kali. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu karena adanya pandemi covid 19 dan kebijakan untuk pembatasan mobilitas dan kerumunan dalam ruangan.

### 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 15 unit dan terealisasi 11 unit. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi karena tidak diperbolehkan dalam pemecahan paket pengadaan.

#### b. Program Penyelenggaraan Pengawasan :

##### 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 8 laporan dan terealisasi 7 laporan. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu kurangnya data dari PD untuk bahan audit kinerja dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 64 kegiatan audit dan hanya terealisasi sebanyak 46 kegiatan audit. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu keterbatasan personil dan beban pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dalam bentuk post audit belanja dalam rangka belanja penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari obrik.

1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 8 dokumen dan terealisasi 6 dokumen. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu adanya revisi atas target yang kurang sesuai.

1.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (target 100% realisasi 99,6%) dan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP ((target 95% realisasi 61,3%). Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi antara lain yaitu adanya TL oleh entitas yang belum sesuai dengan rekomendasi.

#### c. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang tidak tercapai 100% adalah :

1.1 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan dan jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara (target 6 laporan realisasi 0 laporan) dan jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan (target 48 kali realisasi 4 kali). Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu belum adanya laoran ASN dan penyelenggaraan negara yang menerima gratifikasi, konsultasi melalui online dan offline. Online melalui website (fitur KOI) dan telp/whatsapp. konsultasi melalui

website masih belum maksimal hal ini dikarenakan PD masih belum memahami tata cara konsultasi melalui website sedangkan Konsultasi offline dengan datang ke kantor Inspektorat masih belum terdokumentasikan.

1.2 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu :

- a. jumlah unit kerja berpredikat WBK target 1 unit kerja realisasi 0%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB bahwa unit kerja yang diusulkan tidak lolos berpredikat WBK. Penilaian bersifat rahasia sehingga daerah tidak memahami kekurangan apa yang harus dicukupi.
- b. Prosentase PD yang berpredikat SAKIP minimal "BB" target 100% realisasi 61,5%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu masih adanya indikator yang kurang tepat.
- c. Prosentase PD yang dievaluasi dokumen PRG nya dari target 100% realisasi 38,5%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu evaluator melakukan kegiatan pengawasan lain pada waktu yang bersamaan, sehingga hanya dapat melakukan secara sampling terhadap 20 PD saja.
- d. Prosentase OPD yang dievaluasi manajemen resiko target 100% realisasi 61,5%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu adanya PD yang tidak mengumpulkan lke SPIP sehingga tidak dapat dilakukan penilaian.

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu :

- a. Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani target 2 laporan realisasi 1 laporan. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu tidak ada laporan atas kasus yang terjadi terkait benturan kepentingan dan WBS.
- b. Jumlah Probit audit yang dilaksanakan dari target 13 audit realisasi 5 audit. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu karena keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dilaksanakan.
- c. Presentase progress aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan target 80% realisasi 79,42%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi yaitu adanya pandemi covid 19 yang membatasi mobilitas, kurangnya komitmen PD dalam pelaksanaan ren aksi. Terhadap ren aksi yang diampu oleh Inspektorat sendiri tidak dapat dikelola secara optimal karena adanya tugas mandatory baru tahun berjalan dan wajib dilaksanakan karena berkaitan dengan kebijakan nasional.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan**  
**Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2021 Kabupaten Blitar**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>- Nilai SAKIP Inspektorat</b>	<b>BB (80)</b>		<b>BB (80)</b>	<b>BB (82,93)</b>	<b>103,72%</b>				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	24 dokumen		24 dokumen	23 dokumen	96%				
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>7 dok</b>		<b>7 dok</b>	<b>8 dok</b>	<b>114%</b>				

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 dok		14 dok	14 dok	100%					
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>3 laporan</b>		<b>3 laporan</b>	<b>2 laporan</b>	<b>67%</b>					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 orang		50 orang	50 orang	<b>100%</b>					
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%					
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50 orang</b>		<b>50 orang</b>	<b>50 orang</b>	100%					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan - Jumlah PPUPD yang dinilai angka kreditnya	- 50 orang - 13 orang		- 50 orang - 13 orang	- 50 orang - 12 orang	- 100% - 92%					
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%					

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100%				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis		35 jenis	35 jenis	100%				
			<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 jenis		20 jenis	20 jenis	100%				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 jenis		6 jenis	0 jenis	0%				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	200.000 eksemplar		200.000 eksemplar	124.568 eksemplar	62%				
			<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	6 bulan		6 bulan	6 bulan	100%				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1400 kali		1400 kali	411 kali	29%				
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 bulan		6 bulan	6 bulan	100%				
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661 jenis		661 jenis	18 jenis	3%				
			Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	7 unit		7 unit	7 unit	100%				

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	15 unit		15 unit	11 unit	73%				
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%				
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	- Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	70%		70%	65%	93%				
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	Jumlah Laporan Hasil Audit yang disusun	319 laporan		319 laporan	301 laporan	94%				
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah audit yang dilaksanakan	8 audit		8 audit	7 audit	88%				
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah audit yang dilaksanakan	- 24 audit		- 24 audit	- 23 audit	96%				
				- Jumlah audit yang dilaksanakan	- 23 audit		- 23 audit	- 23 audit	58%				
			Reviu Laporan Kinerja	jumlah dokumen yang direviu	6 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%				
			Reviu Laporan Keuangan	jumlah dokumen yang direviu	15 dok		15 dok	15 dok	100%				
			Pengawasan Desa	- jumlah pengawasan yang dilaksanakan	112 audit		112 audit	112 audit	100%				
				- fasilitasi klinik konsultasi desa	6 kali		6 kali	6 kali	100%				
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-Persentase pemenuhan elemen kapabilitas APIP	-100%		-100%	-100%	-100%				
				-Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	100%		100%	99,6%	99,6%				

				BPK -Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	95%		95%	56,5%	59%				
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	jumlah laporan hasil audit yang disusun	29 laporan		29 laporan	60 laporan	207%				
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	jumlah kasus kerugian daerah yang ditangani	12 kasus		12 kasus	59 kasus	491%				
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah audit yang dilaksanakan	17 audit		17 audit	1 audit	5,8%				
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Prosentase PD dengan Nilai Komponen Pengungkit RB Minimal 22	30%		30%	27%	90%				
			<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100%				
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara - jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan - Prosentase PNS yang melaporkan LHKASN tepat waktu	6 laporan  48 kali  100%		6 laporan  48 kali  100%	0 laporan  4 kali  100%	0%  8,3%  100%				

				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - jumlah unit kerja berpredikat ZI yang diusulkan menuju WBK/WBBM - jumlah unit kerja berpredikat WBK - Prosentase PD yang dilakukan PMPRB - Prosentase PD yang berpredikat SAKIP minimal "BB" - Prosentase progres pemenuhan level maturitas SPIP - Prosentase PD yang dievaluasi dokumen PRG nya - jumlah laporan evaluasi unit pelayanan public - Prosentase OPD yang dievaluasi manajemen resiko	3 LHE  1 unit kerja 100% 100% 100% 100% 100% 4 LHE 100%		3 LHE  1 unit kerja 100% 100% 100% 100% 4 LHE 100%	12 LHE  0 unit kerja 100% 61,5% 100% 38,5% 4 LHE 61,5%	400%  0 100% 61,5% 100% 38,5% 100% 61,5%				
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani - Jumlah kasus pungli - Jumlah Probity audit yang dilaksanakan - Presentase progress aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan	2 laporan  0 kasus 13 audit 80%		2 laporan  0 kasus 13 audit 80%	1 laporan  0 kasus 5 audit 79,4%	50%  100% 38,5% 99,2%				
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Prosentase pengaduan yang selesai ditangani	100%		100%	100%	100%				



## 2.2. Analisis Kinerja Inspektorat.

Tabel 1  
Indikator sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Target					
		2016	2017	2019	2019	2020	2021
1	Nilai Sakip	CC	CC	B	BB	A	A

Tabel 2  
Indikator sasaran SKPD/IKU

Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD / IKU	Target					
		2016	2017	2018	2020	2020	2021
1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal	Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal "B"	65%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase OPD yang bebas temuan material	65%	70%	40%	50%	-	-
	Persentase Desa yang bebas temuan material	65%	70%	20%	50%	-	-
	Persentase Rekomendasi Temuan pengawasan yang selesai ditindak lanjuti	75%	76%	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan Masyarakat	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase Kasus pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas (ZI)	5%	3%	3%	3%	-	-
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	-	-	-
Prosentase OPD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3		-	-	-	-	-	40
Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)		-	-	-	-	-	3
Nilai SAKIP Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	80
Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel		-	-	-	-	-	70%
Prosentase PD dengan Nilai Komponen Pengungkit RB Minimal 22		-	-	-	-	-	30%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	-	100%

Dari Tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator sasaran RPJMD ditahun 2021 untuk Nilai Sakip A.

Sedangkan untuk Tabel 2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas pengawasan Internal	Persentase OPD yang nilai SAKIP Minimal “BB”	100%	58%	58%	100%	61,5%	61,5%
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.	100%	99,52%	99,52%	100%	99,6%	99,6%
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak lanjuti.	100%	44,1 %	44,1 %	100%	56,5%	56,5%
		Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	-	40%	16%	40%
		Prosentase OPD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3	-	-	-	40%	0%	40%
		Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	-	-	-	level 3	level 3	100%

Pada Tahun 2021 merupakan periode transisi dari RPJMD periode 2016 – 2021 ke RPJMD periode 2021 – 2026 dan keduanya diukur.

### 2.3. Isue-isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan.

Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan untuk tahun 2023 direncanakan sebanyak 337 Obyek Pemeriksaan yang terdiri dari :

- Pengawasan Keuangan sebanyak 16 obrik.
- Pengawasan Kinerja sebanyak 5 laporan
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 34 laporan.
- Reviu Laporan Keuangan sebanyak 13 laporan
- Reviu Laporan Kinerja sebanyak 11 laporan
- Pemeriksaan Desa sebanyak 28 obrik.
- Monev Desa sebanyak 220 desa.
- Klinik Konsultasi Desa sebanyak 6 kali.
- Pendampingan dan asistensi sebanyak 4 jenis.
- Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan APIP dan BPK
- Optimalisasi kerjasama APIP dan APH
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan, konsultasi dan evaluasi TLHP serta melakukan reviu terhadap laporan keuangan dan reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD  
 Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, ditemui beberapa permasalahan dan hambatan di antaranya :
  1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang.
  2. Tidak sebandingnya tenaga yang tersedia dengan beban kerja.
  3. Latar belakang personil yang bervariasi.
- Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD
  - ❖ Dukungan pimpinan untuk memperkuat APIP baik dalam bentuk dukungan anggaran, pemenuhan personil secara bertahap.
  - ❖ Adanya peraturan dan ketentuan yang sering berubah-ubah
  - ❖ Masih terdapat anggapan Inspektorat belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan masih menganggap Inspektorat sebagai pencari kesalahan tanpa memberi solusi baik melalui Korsupgah maupun penindakan
  - ❖ Adanya mandatory sesuai kebijakan yang memerlukan dari Pusat kegiatan pengawasan oleh seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.
- Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
  - ❖ Adanya komitmen kuat dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi (KKN) melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

- ❖ Kesadaran dan keberanian masyarakat Untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- ❖ Adanya peraturan perundang – undangan terkait kecukupan anggaran untuk Inspektorat
- ❖ Adanya kerjasama APIP – APH terkait penanganan pengaduan yang berindikasi tipikor terhadap ASN maupun pemerintah desa.

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional.

Terhadap pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati, Inspektorat tidak termasuk sebagai PD yang mengampu indikator kinerja daerah, namun mendukung pencapaian Misi ke 3 yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.

Sedangkan terhadap capaian program nasional, untuk Inspektorat Kabupaten Blitar adalah Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dari KPK dan Stranas PK dari KPK, Verifikasi LHKASN, Operasionalisasi Saber Pungli, Pengendalian Gratifikasi, Kerjasama APIP – APH, Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak Tahun 2017.

- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Beberapa hal yang menjadi catatan dari hal tersebut diatas dan masih belum optimal diantaranya adalah :

1. Perlunya komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan bebas KKN.
2. Melaksanakan pengendalian intern antara pimpinan dan staf di masing-masing OPD (SPIP).
3. Implementasi SIPD.
4. Implementasi Siswaskeudes.
5. Perlunya kesadaran OPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dan lebih tertib dalam pengelolaan keuangan negara / daerah dengan kewajiban setor kepada negara atau daerah serta pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja lainnya.
6. Perlunya segera dilaksanakan elektronik audit oleh APIP.

#### 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD

Berdasarkan evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Blitar beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2021, program indikatif di tahun 2021 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 dan 2021-2025, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2021, telaah prioritas RPJMN 2015-2021, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2025 maka Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial;
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas – Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif;
3. Pemantapan Tata Kelol Pemerintahan, Penguatan BUMD, dan Peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan Penyediaan Akses Sarana Prasarana Penunjang Perekonomian;
5. Meningkatkan realisasi investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Renstra SKPD, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar mengusulkan 3 program yang terdiri dari 11 Kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD diharapkan bisa dilaksanakan semuanya dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Blitar :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Blitar

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PEN TING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pemkab blitar				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pemkab blitar				
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	53.940.000	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Pemkab blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	53.940.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemkab blitar	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 laporan	49.532.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemkab blitar	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 laporan	49.532.000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	inspektorat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 orang/bulan	6.821.235.748	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	inspektorat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 orang/bulan	6.379.853.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	inspektorat	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	174.354.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	inspektorat	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	613.137.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	80.894.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	80.894.000	
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	inspektorat	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	57 orang	979.572.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	inspektorat	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	58 orang	979.572.000	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PEN TING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	21.385.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	16.555.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	143.527.468	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	143.527.468	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	24.241.500	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	Inspektorat	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	24.241.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	101.025.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	16.625.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	127.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	127.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	inspektorat	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 laporan	70.000.000	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	inspektorat	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 laporan	70.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 laporan	898.574.427	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 laporan	845.113.001	
1.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab blitar	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	68.713.400	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab blitar	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	68.713.400	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					
	Pengadaan Mebel	inspektorat	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 paket	208.400.000	Pengadaan Mebel	inspektorat	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	203.570.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	inspektorat	Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 paket	478.078.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	inspektorat	Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	389.185.000	
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	8.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	inspektorat	Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	8.115.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	inspektorat	Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	8.115.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PEN TING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	inspektorat	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	220.728.234	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	inspektorat	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	159.728.234	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	192.625.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	192.625.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 unit	103.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 unit	103.560.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	394.675.980	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	inspektorat				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	inspektorat				
2	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>					<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>					
2.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 laporan	86.375.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 laporan	81.395.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 laporan	130.536.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 laporan	93.640.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 laporan	219.063.000	Reviu Laporan Kinerja	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	27 laporan	109.577.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	13 laporan	310.341.000	Reviu Laporan Keuangan	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	128 laporan	281.253.000	
	Pengawasan Desa	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	251 laporan	616.860.000	Pengawasan Desa	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	253 laporan	504.694.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemkab blitar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 dokumen	303.766.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemkab blitar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 dokumen	283.876.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PEN TING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>					<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>					
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pemkab blitar	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 laporan	41.816.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pemkab blitar	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60 laporan	41.816.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	22 laporan	158.534.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemkab blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 laporan	103.190.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>					<i>Pendampingan dan Asistensi</i>					
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	52 perangkat daerah	141.362.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	52 perangkat daerah	135.632.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemkab blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 perangkat daerah	294.556.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemkab blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	188 perangkat daerah	294.556.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemkab blitar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 kegiatan	684.016.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemkab blitar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 kegiatan	611.512.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemkab blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	312.342.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemkab blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	277.487.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, pada Bab II Pasal 2 point 1 dinyatakan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang dipaparan tercantum dalam bab ini yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Inspektorat telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada OPD.

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi SDM petugas di Perangkat Daerah dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan.
2. Mendorong terciptanya kinerja OPD, Desa dan objek pengawasan lainnya yang akuntabel.
3. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas melalui Bimtek, Pendidikan dan pelatihan guna.

##### 3.1.1. Pelaksanaan Korsupgah dan Stranas PK

- a. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Blitar Inspektorat telah menindak lanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi tahun 2019-2022 PK dan menindaklanjuti Stranas Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi JAGA.id KPK.

Fokus Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( PPK ) sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran
  2. Perijinan
  3. Pengadaan Barang dan Jasa
  4. Pengawasan APIP
  5. Manajemen ASN
  6. Tata Kelola Keuangan Desa
  7. Optimalisasi Pajak Daerah
  8. Manajemen Aset Daerah
- b. Melaksanakan Survei Penilaian Integritas
  - c. Pelaksanaan Stranas Pemberantasan Korupsi, fokus pada :
    1. Perijinan dan Tata Niaga
    2. Keuangan Negara
    3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi

Sebagai unit penyelenggara pemerintahan dibidang pengawasan Inspektorat mempunyai peran melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi yang di Rencana Aksikan.

### 1.1.2. Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Indeks Manajemen Resiko

Sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019, seluruh Inspektorat baik Provinsi, Kabupaten dan Kota berada pada level 3. Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Blitar sudah mencapai level 3, namun BPKP akan terus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kapabilitas APIP level 3. Sesuai dengan RPJMN 2020 – 2025, indikator yang menyangkut Inspektorat yaitu Presentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko (Manajemen Resiko Indeks) Level 3. Mulai tahun 2021 telah direncanakan mulai dilaksanakan Penerapan Manajemen Resiko. Selain itu, adanya penilaian SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan setiap tahun mulai Tahun 2021.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran dan target kinerja pada Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat adalah :

### 3.2.1. Tujuan :

- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dan Manajemen Pemerintahan.
- Meningkatkan tatakelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3.2.2. Sasaran

Berikut sasaran Inspektorat sesuai dengan renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026

**Tabel 3**  
**Tujuan, Sasaran, Target Kinerja**

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Tahun ke- (%)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	83,25	83,5	83,75	84
			Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	40	45	50	60	70
			Prosentase OPD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3	40	45	50	55	60
			Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3

### 3.3 Program dan Kegiatan

1.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur kebijakan, fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diterbitkan setiap tahun, terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :

- 1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin
- 2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah
- 3). Pengawasan reformasi birokrasi
- 4). Penegakan Integritas

Meliputi :

- a. Kinerja rutin pengawasan sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Reviu DAK Fisik, Pemeriksaan Kinerja OPD, pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP dan BPK dll.
- b. Pengawasan prioritas nasional sebanyak 7 kegiatan seperti penyerapan anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).
- c. Pengawasan reformasi birokrasi sebanyak 3 kegiatan seperti PMPRB, penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan publik.
- d. Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laporan gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK, verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas dll.
- e. Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas sesuai dengan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi
- f. RPJMN 2020 – 2025, Indesk Manajemen Resiko OPD Level 3
- g. Pengawasan anggaran COVID 19 (termasuk refocusing dan vaksinasi).
- h. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

#### 1.2 Program dan Kegiatan

Terhadap penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Inspektorat merencanakan 3 ( tiga ) program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan, antara lain :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2023  
KABUPATEN BLITAR**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	<b>Inspektorat Daerah</b>					DAU		<b>0</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Pemkab blitar						
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab blitar	6 dokumen	53.940.000		6 dokumen	54.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pemkab blitar	14 laporan	49.532.000		14 laporan	50.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	inspektorat	58 orang/bulan	6.379.853.000		57 orang/bulan	6.850.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	inspektorat	12 dokumen	613.137.000		12 dokumen	175.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	inspektorat	5 laporan	80.894.000		5 laporan	81.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	inspektorat	57 orang	979.572.000		57 orang	1.000.000.000	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Inspektorat	4 paket	16.555.000			4 paket 22.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Inspektorat	4 paket	143.527.468			4 paket 145.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Inspektorat	4 paket	24.241.500			4 paket 25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Inspektorat	4 paket	16.625.000			4 paket 102.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Inspektorat	12 paket	127.000.000			12 paket 128.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	inspektorat	6 laporan	70.000.000			6 laporan 75.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	750 laporan	845.113.001			750 laporan 900.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Pemkab blitar	1 dokumen	68.713.400			1 dokumen 69.000.000	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>								
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	inspektorat	5 paket	203.570.000			10 paket 210.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	inspektorat	17 unit	389.185.000			35 paket 480.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	4 laporan	8.400.000			4 laporan 9.000.000	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	inspektorat	12 laporan	8.115.000			12 laporan	8.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	inspektorat	12 laporan	159.728.234			12 laporan	222.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Inspektorat	25 unit	192.625.000			25 unit	195.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Inspektorat	90 unit	103.560.000			90 unit	105.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Inspektorat	6 unit	0			6 unit	395.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		inspektorat						
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>								
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	5 laporan	81.395.000			5 laporan	87.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	16 laporan	93.640.000			16 laporan	132.000.000
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pemkab blitar	27 laporan	109.577.000			11 laporan	220.000.000
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pemkab blitar	128 laporan	281.253.000			13 laporan	320.000.000
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pemkab blitar	253 laporan	504.694.000			251 laporan	617.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemkab blitar	3 dokumen	283.876.000			3 dokumen	304.000.000

Kode Rekening	Urusan/ Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>								
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pemkab blitar	60 laporan	41.816.000			12 laporan	42.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemkab blitar	18 laporan	103.190.000			22 laporan	160.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>								
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Pemkab blitar	52 perangkat daerah	135.632.000			52 perangkat daerah	142.000.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemkab blitar	188 perangkat daerah	294.556.000			52 perangkat daerah	295.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemkab blitar	9 kegiatan	611.512.000			6 kegiatan	690.000.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemkab blitar	15 perangkat daerah	277.487.000			15 perangkat daerah	313.000.000

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan ditetapkan setiap tahun terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :

- 1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin
- 2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah
- 3). Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
- 4). Penghitungan kerugian negara
- 5). Peningkatan Kapabilitas APIP

Meliputi :

- a. Kinerja rutin pengawasan yaitu reviu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan urusan umum dan teknis.
- b. Pengawasan prioritas nasional seperti penyerapan anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas seperti pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan SPI, PMPRB, asistensi pembangunan RB, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh stranas PK, capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, operasionalisasi saber pungli, pemeriksaan investigatif, tindaklanjut PKS APIP – APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monev TLHP APIP dan BPK.
- d. Penghitungan kerugian negara.
- e. Peningkatan Kapabilitas APIP seperti Kapabilitas APIP level 3, Maturitas SPIP, Penerapan manajemen risiko, Pendidikan profesioanl berkelanjutan minimal 120 jam/tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Output Spesifik		APBD
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Uraian	Target	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>					
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>	100%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	renja, renja P, PKPT, RB, RATL RB	6 dokumen	53.940.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 laporan	Ikjip, ikhtisar hasil pengawasan (2), lppd, lkpj, korsupgah, stranas, laptri bpkp (4), TL BPK, TL APIP	14 laporan	49.532.000
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>	100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 orang/bulan	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	58 orang/bulan	6.379.853.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	613.137.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Laporan keuangan dan koordinasi yang dilakukan	5 laporan	80.894.000
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	58 orang	diklat dan bintek substansi teknis	58 orang	979.572.000

<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	100%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	paket penyediaan komponen listrik	4 paket	16.555.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	143.527.468
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	paket penyediaan peralatan rumah tangga	4 paket	24.241.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	pembelian handsanitizer, masker, gula, kopi, teh	4 paket	16.625.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	fotocopy, cetak, jilid	12 paket	127.000.000
Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 laporan	mamin dan oleh oleh kunjungan tamu	6 laporan	70.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 laporan	perjalanan dinas dalam dan luar daerah, penyediaan paket snack dan nasi	750 laporan	845.113.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	aplikasi e audit	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi e audit dan SIPDA	68.713.400
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>	100%			
Pengadaan Mebel			Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	pengadaan mebel	5 paket	203.570.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	paket pengadaan laptop, komputer, printer, ac dan lain lain	17 unit	389.185.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>	100%		100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	pembelian materei, perangko	4 laporan	8.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	belanja surat kabar/majalah, belanja telepon kantor	12 laporan	8.115.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	pembayaran jasa tenaga kebersihan, tenaga supir, tenaga administrasi	12 laporan	159.728.234

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>	90%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	192.625.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 unit	pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	90 unit	103.560.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	6 unit	0
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel</b>	<b>80</b>					
<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>				<i>Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan</i>	90%			
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 laporan	audit kinerja dan audit kepatuhan	5 laporan	81.395.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 laporan	audit ketaatan/keuangan	16 laporan	93.640.000
Reviu Laporan Kinerja				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	27 laporan	reviu LKJIP, reviu LPPD, reviu RKPDP/RKPD, reviu RPJMD, reviu Renstra,	27 laporan	109.577.000
Reviu Laporan Keuangan				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	128 laporan	reviu DAK, RKA/RKAP, LKPD, KUA PPAS/KUPAPPASP, PBJ PA, Kepatuhan BMD, HSPK, SSH, ASB, LKOPD, LKPD	128 laporan	281.253.000
Pengawasan Desa				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	253 laporan	pengawasan desa yang beresiko/permintaan KDH atau yang lain, monev desa, klinik desa	253 laporan	504.694.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 dokumen	persentase TL rekomendasi APIP, persentase TL rekomendasi BPK, pemenuhan 6 elemen	3 dokumen	283.876.000
<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				<i>prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan</i>	55%			

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60 laporan	kerugian daerah yang ditangani (TPTGR)	60 laporan	41.816.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 laporan	pengawasan BOS, DAK, BANSOS, HIBAH	18 laporan	103.190.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		<b>indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB</b>	<b>70</b>				
<i>Pendampingan dan Asistensi</i>			Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	90%			
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	52 perangkat daerah	konsultasi dan asistensi pada OPD, desa dan pihak lain,	52 perangkat daerah	135.632.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	188 perangkat daerah	asistensi PMPRB pada seluruh PD, pelaksanaan evaluasi PRG, evaluasi SAKIP OPD dan self asesment SAKIP Kab., PMPZI, evaluasi pelayanan publik, verifikasi data dukung LPPD, pemenuhan SPIP terintegrasi, evaluasi manajemen resiko opd, jumlah unit kerja yang berpredikat WBK	188 perangkat daerah	294.556.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 kegiatan	penanganan kasus benturan kepentingan dan WBS, kasus pungli yang terjadi, pelaksanaan probity audit, pemenuhan MCP KPK dan stranas PK melalui aplikasi jaga.id, verifikasi LHKASN, optimalisasi UPG	9 kegiatan	611.512.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	penyelesaian kasus pengaduan, audit investigasi	15 perangkat daerah	277.487.000

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan kepada rencana Strategis (Renstra) mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat, dan Tupoksi Inspektorat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan proiritas bagi Inspektorat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas - tugas pengawasan.
3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walaupun dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan.
4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM )
5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap tribulan kepada Bupati Blitar.

Rencana tindak lanjut :

1. Membuat anggaran kas secara cermat dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan
2. Membuat jadwal kegiatan selama satu tahun
3. Membuat pengendalian kegiatan secara bulanan
4. Laporan kegiatan secara tribulan

Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran Inspektorat bisa terwujud.

Blitar,

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



**AGUS CUNANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650420 199008 1 002